



E-GOVERNMENT DAN ICT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Riris Katharina*)

Abstrak

Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam penerapan e-government di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sekalipun sudah dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Padahal, negara-negara yang melaksanakan e-government seperti Korea Selatan terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, bahkan meningkatkan perekonomian negaranya. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pemerintahan Indonesia dapat diatasi dengan menghadirkan e-government melalui pengadaan ICT. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislasi dapat mendorong dihidirkannya kebijakan yang mendukung implementasi e-government di Indonesia.

Pendahuluan

Konsep *e-government* telah diterapkan oleh dunia internasional. Alat yang dipergunakan untuk mendukung program yaitu dengan menghadirkan ICT (*Information and Communication Technology*). Dunia internasional telah menerapkan ICT dalam berbagai aspek penyelenggaraan negaranya, baik dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Indonesia, dalam beberapa kegiatan di arena eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga telah menerapkan ICT. Namun, dalam perkembangannya, ICT bagi terwujudnya *e-government* di Indonesia belum mengalami perkembangan yang signifikan. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (*e-Government Development Framework*) yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-government*. Apa yang menyebabkannya?

Beberapa persoalan dalam bidang pemerintahan telah memperlihatkan pentingnya Indonesia mengembangkan ICT dalam pemerintahan melalui implementasi *e-government*. Persoalan yang mencuat akhir-akhir ini antara lain, *pertama*, e-KTP dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Tetap untuk menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak yang direncanakan pada bulan Desember 2015 ini, dimana masih banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan peluang mobilisasi pemilih terutama di

*) Peneliti Madya Administrasi Negara, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. *E-mail*: riris.katharina@dpr.go.id.



daerah perbatasan. *Kedua*, pengawasan dana desa, yang berdasarkan APBN Tahun 2016 dialokasikan Rp46,9 triliun untuk 74.754 desa. Minimnya jumlah aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat diselesaikan melalui aplikasi teknologi informasi khusus pengelolaan dana desa, yaitu Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. *Ketiga*, terkait sertifikasi. Ada banyak produk barang yang dihasilkan oleh pengusaha kecil Indonesia yang harus melalui proses sertifikasi berupa penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk dapat dipasarkan. Namun, saat ini banyak industri rumah tangga yang kesulitan mengurus sertifikasi terutama di daerah dan juga mahal biaya sertifikasi. Dan masih banyak masalah lainnya dalam bidang pemerintahan yang sesungguhnya berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah menerapkan *e-government* telah dapat mengatasi masalah tersebut.

Pentingnya *e-Government* dan ICT

Dalam banyak literatur, *e-government* seringkali juga disebut dengan *e-governance*—dengan berbagai konsep—seperti *e-administration*, *e-education*, *e-health*, *e-voting*, dan lain-lain. *E-government* adalah penggunaan ICT untuk mentransformasi pemerintah dengan membuatnya lebih mudah diakses, efektif, akuntabel, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi dalam demokrasi, dan mendukung penyusunan kebijakan publik.

Relasi antara ICT dan pemerintah bersifat ganda. Pemerintah mendukung perkembangan ICT sehingga dapat lebih menyebarluaskan informasi yang kuat, merangsang debat dan partisipasi, dan pada saat yang bersamaan, menguatnya peralatan sistem informasi dan manajemen pengetahuan dapat memfasilitasi proses pemerintahan.

Dalam laporan PBB pada tahun 2005, kesiapan Indonesia terhadap *e-government* mengalami penurunan dari tahun 2004 di peringkat 85 menjadi peringkat 96 di tahun 2005 (lihat Tabel 1). Padahal, dari hasil riset PBB terbukti bahwa negara yang memiliki komitmen kuat untuk memberikan akses dan penggunaan ICT merupakan kunci bagi pembangunan *e-government* di suatu negara (seperti Korea Selatan, Singapore, dan Jepang).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa pengguna internet di Indonesia semakin tahun semakin bertambah (lihat Tabel 2). APJII dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI) merilis riset bahwa terjadi kenaikan penetrasi internet dari 28,6% di tahun 2013 menjadi 34,9% di tahun 2014 dari total populasi Indonesia. Namun demikian, penetrasi itu masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 50% pada akhir tahun 2015. Sekalipun juga Pemerintah telah berupaya untuk mencapai target tersebut dengan menyediakan akses internet di kecamatan melalui *Community Acces Point* (CAP), yaitu di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Lampung.

Tabel 1. Peringkat Kesiapan e-Government di Asia Tenggara

No.	Negara	Indeks	Peringkat Global		Perubahan
		2005	2005	2004	
1.	Rep. Of Korea	0.8727	5	5	0
2.	Singapore	0.8503	7	8	1
3.	Japan	0.7801	14	18	4
4.	Philippines	0.5721	41	47	6
5.	Malaysia	0.5706	43	42	-1
6.	Thailand	0.5518	46	50	4
7.	China	0.5078	57	67	10
8.	Brunei Darussalam	0.4475	73	63	-10
9.	Mongolia	0.3962	93	75	-18
10.	Indonesia	0.3819	96	85	-11
11.	Viet Nam	0.3640	105	112	7
12.	Cambodia	0.2959	128	129	1
13.	Myanmar	0.2959	129	123	-6
14.	Timor Leste	0.2512	144	174	30
15.	Lao PDR	0.2421	147	144	-3
	Rata-rata	0.922			

Sumber: United Nations, Global e-Government Readiness Report 2005

Tabel 2
Pengguna Internet di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna
2007	20 juta
2008	25 juta
2009	30 juta
2010	42 juta
2011	55 juta
2012	63 juta
2013	71,9 juta
2014	88,1 juta

Riset APJII juga memperlihatkan bahwa sebesar 78,5% pengguna internet masih berada di Indonesia bagian barat dan didominasi di wilayah perkotaan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Pengguna Internet Berdasarkan Wilayah di Indonesia

Wilayah	Jumlah Pengguna
Sumatera	18.6 juta
Jawa Bali	52 juta
Kalimantan	4.2 juta
Sulawesi	7.3 juta
Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku	5.9 juta

Sumber: APJII, 2014

Sementara itu, untuk aksesibilitas sebanyak 85% menggunakan ponsel (lihat Tabel 4). Hasil riset juga memperlihatkan bahwa biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses internet juga mahal.

Tabel 4. Perangkat yang Digunakan untuk Akses Internet

Perangkat	Persentase Pengguna
Telepon Seluler	85%
Laptop/Netbook	32%
PC/Komputer	14%
Tablet	13%

Sumber: APJII, 2014

Tabel 2,3 dan 4 memperlihatkan bahwa perkembangan ICT di Indonesia sesungguhnya sudah semakin tinggi. Namun, perkembangan tersebut kurang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui *e-Government*.

Masa Depan *e-government* dan ICT di Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa hasil evaluasi pemekaran daerah memperlihatkan terjadinya paradoksal otonomi daerah dengan kedekatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Hadirnya daerah otonom baru ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat tetap harus berhadapan dengan pelayanan administrasi yang lambat. Selain itu, dalam kaitannya dengan kinerja legislatif, masalah utama dalam tata kelola pemerintahan yang dirasakan yaitu kurang terlibatnya masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan kurang dibuka akses bagi publik untuk mendapatkan hasil-hasil sidang. Sedangkan dalam bidang yudikatif, transparansi pengambilan keputusan dan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil putusan yang cepat masih merupakan masalah utama yang dirasakan.

Permasalahan dalam segala bidang pemerintahan yang selalu dikeluhkan masyarakat sesungguhnya dapat diatasi dengan ICT. Pengalaman Korea Selatan dalam Gerakan Internet – sebuah kebijakan menghadirkan internet dalam setiap gerak masyarakat Korea – telah menempatkan Korea Selatan sebagai negara maju saat ini. Pilihan teknologi *digital subscriber line* (DSL) yang dipilih Pemerintah Korea Selatan telah merangsang penggunaan internet yang sangat masif di kalangan masyarakat Korea Selatan dengan memasang koneksi internet ke rumah-rumah. Pemerintah juga menyediakan kelas bersubsidi bagi mereka yang ingin mempelajarinya. Gerakan Internet juga dilakukan dengan memberikan komputer bersubsidi kepada masyarakat Korea Selatan. Saat ini Korea Selatan dikenal sebagai surga teknologi. Selain memiliki tingkat akses *broadband* terluas di dunia, Korea Selatan juga memiliki tingkat literasi komputer tertinggi.

Tuntutan dunia luar juga mengharuskan Indonesia harus segera berfokus kepada *e-government*. Ambil contoh, ke depan para guru dituntut memiliki keterampilan dan metode khusus dalam mengajar. Statistik Biro Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tahun 2013 memprediksikan bahwa pada tahun 2020 di seluruh dunia akan terbuka 6,2 juta lowongan kerja di bidang komputansi awan berbasis teknologi, dengan rincian 51% pekerjaan di bidang komputer, 27% di bidang teknik, dan 18% di bidang lain yang terkait komputasi awan

berbasis teknologi. Padahal, kondisi daya saing sumber daya manusia Indonesia saat ini justru melemah, menurun dari urutan ke-25 menjadi ke-41 dalam World Talent Report.

Keberhasilan pelaksanaan *e-government* dalam ranah eksekutif terbukti sangat dipengaruhi oleh keberadaan ICT. Lihat saja kasus di DKI Jakarta dengan hadirnya berbagai pelayanan secara elektronik, salah satunya dengan menghadirkan aplikasi "qlue" yang memungkinkan masyarakat segera melaporkan keluhan mereka kepada gubernur dan akan segera ditindaklanjuti. Tidak hanya di DKI Jakarta, sebagai ibukota negara, Kota Surabaya yang sudah dikenal lebih dulu sebagai kota *e-government* juga telah memperlihatkan bukti nyata keberhasilan *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Demikian pula di kabupaten Batang juga telah membuktikan hal serupa. Penerapan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah menekan pengeluaran sebesar Rp10,7 miliar, selain juga menarik investor dari luar.

Namun, saat ini kita belum mendengar terjadinya gerakan ICT di parlemen dan di yudikatif. Gerakan yang dimaksud bukan hanya sekedar mengadakan peralatan, namun mengubah *mindset* atau budaya kerja dalam rangka terwujudnya good governance dalam segala bidang kenegaraan.

Penutup

Dilihat dari tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia, sesungguhnya Indonesia juga dapat membangun *e-government* seperti Korea Selatan. Apalagi daya beli masyarakat Indonesia masih tinggi. Hanya saja, pembangunan infrastruktur untuk dapat meningkatkan penggunaan internet, terutama di kawasan Timur Indonesia harus ditingkatkan.

Peran pemerintah sangat penting untuk keberhasilan implementasi *e-government* di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah saat ini harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada implementasi *e-government* dalam setiap lini. Tidak hanya di ranah eksekutif, namun juga di ranah legislatif serta yudikatif.

Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI dapat mendorong dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mendukung *e-government*. Dorongan menerapkan *e-government* harus dilakukan dengan tidak hanya mengadakan peralatan dalam rangka ICT namun juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan ICT itu sendiri. Menganggap ICT hanya sebagai proyek pengadaan barang juga akan menimbulkan kegagalan dalam implementasi *e-government*. Oleh karena itu, pemahaman para penyusun dan implementor kebijakan harus sama terhadap hal ini.

Referensi

- Al-Hakim, Latif, *Global e-government: Theory, Applications and Benchmarking*, Idea Group Publishing, USA, 2007.
- "Dana Desa: Aparatur Hadapi Berbagai Persoalan", *Kompas*, 17 November 2015.
- "Daya Saing Indonesia Melemah", *Kompas*, 18 November 2015.
- "Depkominfo Bangun Community Access Point (CAP) untuk Tiga Provinsi", <http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-communication-and-informatics/876-ipitek/2136-depkominfo-bangun-community-access-point-cap-untuk-tiga-propinsi->, diakses tanggal 24 November 2015.
- Djadijono, M (ed.), *Membangun Indonesia dari Daerah*, CSIS, Jakarta, 2006.
- Jaffe, Sam., Kim, Oak Myung., *The New Korea*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- "Laboratorium Pengujian Belum Ada di Daerah", *Kompas*, 17 November 2015.
- Misuraca, C. Gianluca, *e-governance in Africa: from Theory to Action. A Handbook on ICTs for Local Governance*, Africa World Press & International Development Research Centre, New Jersey, 2007.
- "Pemerintahan Daerah: Kepemimpinan yang Memberi Teladan", *Kompas*, 18 November 2015.
- "Pendidikan Dituntut Ikuti Perubahan Zaman: Guru Harus Memiliki Keterampilan dan Metode Pengajaran", *Kompas*, 18 November 2015.
- "Upaya Mempersempit Kesenjangan Digital di Indonesia", *Kompas*, 17 November 2015.